



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT WASKITA KARYA (PERSERO), TBK.
UNIT KERJA : DIREKTUR UTAMA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : A.S WISNU WIJAYANTO
- Jabatan** : KEPALA DIVISI INTERNAL AUDIT
- NHK** : 183073

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.312.200.000**

- Tanah Seluas 157 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 94.200.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.315.000.000
- Tanah Seluas 198 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000
- Tanah Seluas 304 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 785.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **612.000.000**

- MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO 125 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
- MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- MOTOR, HONDA BEAT HIB02N42LO A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **4.315.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **103.450.400**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **990.645.097**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----

Rp. 4.022.610.497

III. HUTANG

Rp. 26.015.075

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.996.595.422

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.